

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asia Timur adalah salah satu kawasan paaling potensial, baik secara geografis, demografis, dan ideologis. Dengan segala potensi yang terdapat didalamnya, negara-negara adidaya merasa perlu memperluas pengaruhnya dengan tujuan untuk mendominasi kawasan. Tak terlepas dari potensi, kawasan ini juga diwarnai dengan berbagai konflik, salah satu konflik terbesar terjadi di Semenanjung Korea diantara Korea Selatan dan Korea Utara. Perselisihan diantara kedua Korea telah terjadi sejak 25 Juni 1950, hal ini yang menjadikan sedari awal Semenanjung Korea telah manjadi wilayah yang rawan akan konflik (Syahrin, 2018). Lebih lagi, konflik yang ada diperkeruh dengan adanya keterlibatan banyak negara yang turut mempengaruhi hingga konflik kedua Korea semakin kompleks, yang akhirnya berujung pada pecahnya Perang Korea yang terjadi hingga sampai pada 27 Juli 1953. Saat terjadinya Perang Korea, invasi yang agresif digencarkan Korea Utara terhadap Korea Selatan yaitu dengan melintasi perbatasan yang dikenal sebagai garis 38 paralel (Djelantik, 2015). Dalam keadaan tersebut, Amerika Serikat sebagai aliansi Korea Selatan memberikan bantuan yakni dengan mngirimkan pasukan militer ke Semenanjung Korea guna melindungi Korea Selatan. Perang Korea semakin memanas dengan adanya bantuan Uni Soviet dan Tiongkok kepada Korea Utara (Shambaugh, 2008).

Hingga kini, kedua negara yang berkonflik belum memiliki putusan untuk berdamai, demikian pula untuk reunifikasi. Semenanjung Korea masih menjadi

wilayah yang rawan terlebih ketika Korea Utara intensif dalam kepemilikan nuklir yang kini menjadi salah satu isu ancaman keamanan terbesar dalam kawasan Asia Pasifik (Syahrin, 2018). Sejarah mencatat Korea Selatan dan Amerika Serikat kemudian menjalin hubungan baik sejak bantuan Amerika Serikat saat Perang Korea dan diikuti dengan adanya perjanjian bilateral yang terjadi diantara keduanya, yakni *Mutual Defense Treaty* pada tahun 1954, adapun perjanjian ini menetapkan bahwa Amerika Serikat akan menjadi aliansi militer sekaligus komando operasi pasukan gabungan diantara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Dalam perjanjian ini Amerika Serikat berperan dan bertanggung jawab untuk merencanakan pembelaan secara khusus bagi keamanan Korea Selatan. (Gusfianda, 2017). Disisi lain, pada tahun 1961 Tiongkok mengadakan perjanjian pertahanan dengan Korea Utara. Melalui keadaan tersebut dapat dipahami bahwa dua negara yang berkonflik di Semenanjung Korea digandeng oleh dua negara adidaya yang memiliki sejarah rivalitas berkepanjangan dalam dunia internasional (International Institute for Strategic Studies, 2017).

Hubungan antara negara-negara tidak berhenti dalam perjanjian tersebut, secara khusus diantara Korea Selatan dan Amerika Serikat yang dibangun secara kuat dan intensif. Hingga pada 8 Juli 2016, keduanya bersepakat untuk memasang *Terminate High Altitude Area Defense* (THAAD) pada beberapa wilayah di Korea Selatan. THAAD merupakan sistem pertahanan yang ditawarkan Amerika Serikat dan merupakan teknologi militer yang dirancang untuk menangkal rudal balistik. Sistem ini menjadi salah satu paling maju dan paling canggih diantara sejenisnya. Pemasangan THAAD di Korea Selatan menjadi perwujudan komitmen Amerika

Serikat sebagai negara yang berupaya menjaga keamanan regional sekaligus sebagai bukti tanggung jawab Amerika Serikat, mitra militer Korea Selatan sedari awal. Akan tetapi, kesepakatan dan pemasangan THAAD mendapat penolakan keras dari Tiongkok dan menilai sistem tersebut dapat mengganggu kedaulatannya di kawasan (Panda, 2017).

Penolakan yang diutarakan Tiongkok tentu tidak terlepas dari adanya rivalitas yang tinggi antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Tiongkok mengkritik pemasangan sistem THAAD dianggap berlebihan apabila hanya untuk kebutuhan pertahanan Semenanjung Korea dan dianggap mengganggu stabilitas keamanan kawasan Asia Timur (Kwon, 2017). Korea Selatan berupaya memberikan penjelasan kepada pihak Tiongkok bahwasanya adapun pemasangan THAAD bertujuan untuk dapat menjaga keamanan Korea Selatan, terlebih ditegah keagresifan tetangganya Korea Utara. Korea Selatan menekankan pemasangan THAAD tidak akan berdampak pada Tiongkok ataupun merusak kepentingan keamanan Tiongkok terlebih kawasan. Namun hal tersebut tidak cukup efektif membenteng kemarahan Tiongkok (Maulana, 2017). Hubungan Korea Selatan dan Tiongkok semakin memanas hingga Tiongkok mengecam Korea Selatan dengan memberikan sanksi ekonomi berupa boikot dalam berbagai bidang ekonomi dan perdagangan, secara khusus dalam ekspor industri budaya milik Korea Selatan yang tercatat telah menjadi salah satu sumber devisa terbesar bagi negara.

Sanksi ekonomi berupa boikot terhadap produk-produk industri kebudayaan tentu menjadi sesuatu yang sangat fatal bagi Korea Selatan sebagaimana industri ini menjadi sumber pendapatan utama bagi negara melalui ekspor ke berbagai

negara dan dalam hal ini, Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor terbesar sejak tahun 2015 (Jun, 2017). Tiongkok secara sengaja menempatkan sanksi paling beresiko bagi Korea Selatan yakni dengan menarget industri kebudayaan sebagai objek sanksi ekonomi. Untuk itu dalam dilema keamanan pertahanan dan militer lewat uji coba nuklir Korea Utara di semenanjung korea, Korea Selatan turut dihadapkan pada dilema keamanan dalam aspek lain bagi negaranya, yaitu aspek perekonomian. Terlebih, Tiongkok tercatat secara serius menerapkan sanksi boikot terhadap keseluruhan produk-produk industri kebudayaan yang menimbulkan *econom cost* yang tinggi (Harrell, 2018). Keadaan ini membuat Korea Selatan mengalami proses *shifting* atau perubahan dan pergeseran isu strategis atau isu yang tengah diutamakan dan diprioritaskan oleh negara. Sebagaimana perekonomian menjadi sesuatu paling esensial bagi negara baik untuk keberlangsungan negara, bahkan untuk memadai militer, dengan itu ekonomi turut menjadi faktor utama. Maka boikot Tiongkok terhadap industri kebudayaan yang mana merupakan sumber pendapatan Korea Selatan memungkinan Korea Selatan mengalami pergeseran isu strategis.

Industri budaya merupakan produk-produk kebudayaan yang dipasarkan secara mendunia dengan tujuan politis dan ekonomi. Dalam buku *The Cultural Industry* karya Theodor Adorno dan Max Horkheimer, dijelaskan bahwa globalisasi dan kemajuan peradaban telah melahirkan budaya yang diproduksi secara massif, yang mana kebudayaan ini bukan berasal dari ekspresi kultural rakyat kebanyakan, melainkan berupa hasil produksi industri. Dalam hal ini dijelaskan industri kebudayaan telah mampu menyatukan budaya lama atau budaya yang familiar

menjadi suatu produk kebudayaan yang dapat dikonsumsi secara massif dan dengan kualitas baru. (Adorno, 1944). Industri budaya menjadi industri utama yang dikerahkan oleh Korea Selatan sejak tahun 1990 sehingga negara tersebut sangat terkemuka lewat kebudayaannya. Sejak 1992, kebudayaan Korea Selatan banyak diminati oleh penduduk Tiongkok yang kemudian menyebutnya dalam istilah Hallyu (Kwon, 2017). Perekonomian Korea Selatan berkembang pesat dengan persebaran industri budaya di Tiongkok yang kemudian menjadi salah satu pasar terbesar industri budaya Korea Selatan.

Boikot terhadap industri budaya tentu membuat Korea Selatan mengalami kerentanan pada perekonomian dan menimbulkan *economic cost* yang tinggi. Pasalnya, Tiongkok secara tegas menetapkan sanksi ekonomi kedalam banyak bidang perdagangan dan ekonomi. Adanya boikot diberlakukan dalam banyak praktik, mulai dari pelarangan wisatawan Tiongkok ke Korea Selatan, pelarangan beroperasi perusahaan Korea Selatan yaitu Lotte Group di Tiongkok, pelarangan masuk atau impor segala jenis produk-produk Korea Selatan, mulai dari kosmetik atau K-Beauty, konten-konten budaya yang diproduksi Korea Selatan mulai dari drama atau K-drama, musik atau K-pop, film, berita dan program hiburan lainnya. Bahkan, program televisi Korea Selatan serta merta digantikan oleh program dari televisi nasional Tiongkok. Banyak bintang Hallyu yang tidak mendapat izin, dilarang tampil dan dibatalkan konsernya serta disingkirkan dari iklan-iklan oleh pemerintah Tiongkok (Kwon, 2017).

Pada Oktober 2017, Korea Selatan menyetujui permintaan Tiongkok untuk mengubah kebijakan THAAD melalui poin-poin *Three NOs*. Adapun inti dalam

Three NOs adalah boikot Tiongkok diberhentikan hanya apabila Korea Selatan mengembalikan misil milik Amerika Serikat (Axelrod, 1985). Keinginan Korea Selatan untuk mengikuti kebijakan Tiongkok dan melepaskan kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat menjadi hal yang dipertanyakan dalam penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian yang juga mengkaji industri budaya Korea Selatan, boikot Tiongkok, dan keterkaitannya dengan penempatan THAAD milik Amerika Serikat yang kemudian dijadikan sebagai tinjauan pustaka diantaranya: Tinjauan Pustaka pertama adalah skripsi Leo Farhan dengan judul “Kerjasama Militer Korea Selatan – Amerika Serikat dalam Penempatan THAAD (Studi Kasus: Uji Coba Misil Balistik Korea Utara 2013-2017)”. Skripsi ini melihat bahwa fokus kerjasama militer yang dilakukan Korea Selatan dan Amerika Serikat sebagai upaya untuk peningkatan alutsista milik Korea Selatan. Peneliti berpendapat bahwasanya pemerintah Korea Selatan telah menetapkan kebijakan pilihan paling tepat guna melindungi Korea Selatan dari ancaman rudal balistik Korea Utara yakni dengan kesepakatan dan pemasangan THAAD.

Tinjauan Pustaka kedua adalah skripsi karya Qonita Amalia berjudul “Diplomasi Hallyu terhadap China terkait Kemelut *Terminal High Altitude Area Defense* di Korea Selatan Tahun 2016-2017”. Penelitian ini berfokus pada fakta bahwa Tiongkok merupakan pasar yang besar bagi Korea Selatan dalam menyebarkan Hallyunya dan telah menyumbangkan pemasukan bagi kas negara. Untuk itu penulis beragumen bahwa penyebaran Hallyu di pasar Tiongkok di tengah kemelut THAAD berpotensi merusak hubungan interdependent diantara Korea Selatan dan Tiongkok. Sebagaimana Korea Selatan membutuhkan Tiongkok

sebagai mitra perdagangan yang besar begitupun Tiongkok yang membutuhkan produk Korea Selatan guna pemenuhan kebutuhan masyarakatnya dan tempat berinvestasi para pengusahanya. Putusan mengenai pemasangan THAAD menimbulkan respon negatif dari negara Tiongkok yang merasa sistem ini cukup meresahkan dan akan membawa kerugian bagi kedua negara. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Tinjauan Pustaka ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Kim Si-joong yang berjudul “*Economic and Trade Relations as an Arena of Korea-China Contention*”. Penulis menjelaskan bahwa pada dasarnya Tiongkok dengan Korea Selatan telah mempertahankan hubungan ekonomi yang baik sebagaimana terdapat ekspansi yang luar biasa dari adanya perdagangan dan arus investasi antara keduanya. Lebih lagi, hubungan bisnis antara Korea Selatan dan Tiongkok semakin diperlancar dengan adanya *Foreign Direct Investment* yang disepakati. Hubungan ekonomi bilateral terus meningkat setiap tahunnya dan semakin ketergantungan antara satu sama lain. Namun, kemunculan THAAD menjadi celah bagi keduanya hingga terdapat perselisihan dalam ekonomi dan perdagangan. Kim memprediksi bahwa perselisihan mengenai keamanan, perdagangan, investasi, dan teknologi diidentifikasi sebagai potensi adanya konflik antara Tiongkok dan Korea Selatan di masa depan.

Tinjauan Pustaka keempat adalah jurnal karya Tae Young Kwon yang berjudul “*The Effect of THAAD on Korean Consumers and Distributors*”. Dalam tulisan ini, Kwon mendeskripsikan pengembangan THAAD sebagai ancaman bagi

distributor produk-produk Korea Selatan di Tiongkok. Mulai dari produk industri hiburan, sebagaimana Tiongkok telah menjadi pasar utama Korean Wave dan pemblokiran yang dilakukan Tiongkok serta merta memaksa program kebudayaan dan seni Korea Selatan digantikan oleh milik Tiongkok. Pengembangan THAAD juga memberikan dampak pada distributor produk Korean Wave lainnya di Tiongkok yakni pada bidang kosmetik. Sebagai dampak paling parah, THAAD menyebabkan kemuduran pada Lotte Corporation di Tiongkok. Penulis berpendapat bahwa sanksi dan pemblokiran yang dikenakan Tiongkok semakin efektif dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dari masyarakat Tiongkok yang serta merta turut melakukan protes dan memboikot Lotte. Tae Young mengambil kesimpulan bahwa pengembangan THAAD di Korea Selatan bukan hanya mempengaruhi sistem pertahanan Korea Selatan, namun juga sistem ekonomi di Korea Selatan karena persepsi Tiongkok tentang pengembangan THAAD yang membahayakan posisi mereka dan apabila ingin tetap melanjutkan pengembangan THAAD maka Korea Selatan untuk mengurangi ketergantungannya dalam bidang ekonomi dengan pasar Tiongkok, atau sebaliknya melepaskan THAAD demi mempertahankan perekonomian negara (Kwon, 2017).

Tinjauan pustaka pertama dan kedua memiliki kesamaan dalam menetapkan tema penelitian namun keduanya memberi pandangan yang berbeda dimana tinjauan pustaka pertama lebih memilih fokus pada THAAD dan isu militer sebagai fokus sehingga beranggapan bahwa Korea Selatan seharusnya fokus pada kerjasama dengan Amerika Serikat demi keamanan nasional. Sementara tinjauan pustaka kedua melihat diplomasi Hallyu atau industri kebudayaan menjadi sesuatu

yang esensial sekaligus menjadi alat Korea Selatan untuk dapat meningkatkan perekonomian. Dengan itu hubungan dengan Tiongkok menjadi isu utama yang diyakini akan mendatangkan keuntungan lebih terhadap Tiongkok pasalnya peneliti melihat adanya interdependensi kedua negara yang apabila dikelola dengan baik akan menguntungkan Korea Selatan. Di sisi lain, tinjauan pustaka ketiga berusaha menjelaskan bagaimana hubungan baik dalam perekonomian antara Tiongkok dan Korea Selatan telah berjalan sejak lama dan hal ini membangun ketergantungan yang harmonis, untuk itu Korea Selatan seharusnya sejak awal tidak perlu menempatkan THAAD karena hanya akan merusak hubungan dengan Tiongkok.

Tidak jauh berbeda, tinjauan pustaka keempat juga menggambarkan efek penempatan THAAD di Korea Selatan, dimana bukan hanya berdampak pada industri budaya namun investasi dan bisnis swasta juga mengalami boikot. Peneliti percaya hubungan bilateral dengan Tiongkok lebih utama sebagaimana Tiongkok menjadi pangsa pasar terbesar bagi Korea Selatan. Penelitian ini berbeda dengan keempat penelitian sebelumnya, dimana keempatnya cenderung fokus melihat Korea Selatan dan Tiongkok dalam sebuah hubungan yang bersifat interdependen dan demi keuntungan ekonomi Korea Selatan melepaskan kerjasama THAAD dengan Amerika Serikat. Sementara penelitian ini ingin memahami bentuk hubungan Korea Selatan baik dengan Tiongkok maupun dengan Amerika Serikat dimana keduanya tentu memiliki hubungan baik dengan Korea Selatan, terlebih Amerika Serikat yang menjadi mitra Korea Selatan dalam melewati Perang Korea namun faktanya Korea Selatan lebih memilih melepaskan kerjasamanya dengan Amerika Serikat dan mengikuti kebijakan Tiongkok.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang diatas permasalahan yang dipertanyakan dalam penelitian ini, “Mengapa Korea Selatan menerapkan manuver politik dengan melepaskan kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat dan mengikuti kebijakan Tiongkok?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk sanksi blokot yang diberikan Tiongkok kepada Korea Selatan dan mengetahui dampaknya terhadap Korea Selatan hingga memahami sejauh mana efektifitas sanksi boikot ini merubah kebijakan sekaligus sikap Korea Selatan. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan Korea Selatan memilih sikap untuk mengikuti permintaan Tiongkok yakni untuk mengembalikan misil Amerika Serikat serta hal hal yang mempengaruhi Korea Selatan dalam menetapkan keputusan ini. Penelitian ini ingin memahami mengapa Korea Selatan memilih melepaskan Amerika Serikat demi beraliansi dengan Tiongkok.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat penelitian yang bisa diambil dalam penelitian ini, yaitu pertama, manfaat secara akademis dan kedua manfaat secara praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu berkontribusi dalam menambah penelitian-penelitian sebelumnya yang sekiranya masih belum lengkap secara khusus mengenai hubungan diantara Korea Selatan baik dengan Amerika Serikat maupun Tiongkok dan isu-isu politik diantara ketiganya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa sumbangsih pengetahuan tentang adanya pergeseran aliansi sekaligus isu strategis oleh negara. Penelitian ini turut diharapkan mampu memperdalam kajian para pembaca terkait ruang lingkup hubungan International tentang realisme dan neorealisme politik, manuver politik serta melihat konteks isu starategis serta aliansi yang berkaitan dengan kepentingan nasional suatu negara.

1.5 Landasan Teori : Neorealisme

Untuk menganalisis rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori neorealisme, salah satu aliran dari teori realisme sebagai dasar berpikir. Neorealisme dikemukakan pada 1970-an, teori ini muncul sebagai respon atas tantangan yang dikemukakan oleh teori independensi sekaligus sebagai koreksi terhadap teori realisme tradisional yang acapkali mengabaikan kekuatan ekonomi dalam menjelaskan fenomena yang ada. Kenneth Waltz, salah satu tokoh neorealisme menjelaskan bahwasanya neorealisme menjadi kajian ilmu hubungan internasional yang berusaha memasukkan disiplin yang lebih saintifik dan

metodologis seperti antropologi dan ekonomi (Waltz, 1979). Sebagai peremajaan dari teori realisme, neorealisme tentu tidak berbeda jauh dari realisme. Kedua teori memiliki pandangan yang cenderung negatif terhadap interaksi internasional, namun kedua teori berbeda dalam memandang subjek yang dapat mempengaruhi perilaku negara. Realisme meyakini bahwa perilaku negara dipengaruhi oleh sifat dasar manusia yang jahat dan negara dipimpin oleh manusia dengan sifat dasar tersebut, sedangkan neorealisme meyakini perilaku negara tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh sifat dasar manusia, melainkan oleh adanya sistem internasional yang anarki (Robert Jackson and Georg Sørensen, 2013).

Terdapat beberapa asumsi dasar neorealisme yang akan digunakan sebagai dasar berpikir dalam penelitian ini, antara lain:

1. Sistem internasional adalah anarki dan tidak ada pemerintahan yang absolut atau yang mampu mengatur negara-negara (Waltz, 1979). Dalam hal ini setiap negara akan berupaya untuk dapat memenuhi kepentingan nasionalnya. Asumsi ini yang menghantarkan neorealisme dikenal sebagai realisme yang struktural. Sebagaimana asumsi dasar neorealisme yang menyatakan tidak ada keterkaitan diantara sifat dasar manusia dengan perilaku negara, sehingga adapun alasan dibalik sikap dan peranan yang dipilih negara adalah hanya sebagai sebuah strukturisasi dalam sistem internasional yang akhirnya memaksa suatu negara untuk memilih sikap dan peran tertentu (Ambarwati dan Subarno Wijatmadja, 2016). Dalam anggapan ini dijelaskan misalnya sikap negara ingin berkuasa

didasari sistem internasional yang anarki dan memaksa negara untuk memiliki kekuasaan sehingga tetap dapat aman dalam sistem yang anarki. Realisme struktural mempunyai pendapat yang lebih realistis dalam menyikapi sebuah fenomena yang ada dalam sistem internasional, tidak mserta merta hanya pesimis terhadap sifat dasar manusia karena terdapat faktor-faktor lain yang menentukan sikap negara. Selain sistem internasional yang anarki, terdapat kepentingan nasional tiap negara untuk dapat mempertahankan keberlangsungannya dalam sistem yang anarki tersebut atau dalam istilah hubungan internasinal dikenal dengan istilah *survive* (Waltz, 1979).

2. *Ultimate goal* atau tujuan utama bagi negara bukanlah *power* atau kekuasaan melainkan *survive* atau kelangsungan dan eksistensi negara (Waltz, 1979). Mempertahankan eksistensi menjadi hal utama karena neorealisme percaya untuk mencapai kepentingan negara harus mempertahankan keberadaan dalam panggung internasional. Lebih lagi, untuk dapat *survive* negara harus berupaya meningkatkan kapabilitas yang ada sehingga menjadi daya saing untuk dapat berhadapan dengan kekuatan besar yang ada dalam sistem internasional yang anarki (Waltz, 1979). Untuk dapat “eksis”, negara perlu memiliki memiliki kapabilitas lebih yang tidak dimiliki negara lain, biasanya negara akan mengembangkan hal paling potensial dalam negaranya yang kemudian ditawarkan

sebagai kekuatan baru untuk semakin menunjukkan dan menjamin keberadaannya tetap stabil dalam sistem internasional yang anarki.

3. Upaya negara untuk *survive* adalah meningkatkan kapabilitas dan melakukan distribusi kekuasaan (Baldwin, 1993). Dalam hal meningkatkan ini, dijelaskan bahwa negara perlu meningkatkan mengerahkann dan memperkuat kemampuan dan kekuatannya untuk dapat tetap eksis dan dipandang secara global. Kemampuan dan kekuatan negara di kanca internasional serta merta membentuk citra nasional. Sebagaimana setiap negara ingin memiliki citra sebagai negara maju dan terkemuka. Dan dalam hal membangun citra nasional tersebut, negara menetapkan suatu sektor dalam negaranya yang kemudian menjadi kapabilitas utama yang menghantarkan negara kepada kekuatan baru yang membuat negara dipandang dan diakui secara mengglobal. Tidak hanya itu, upaya untuk *survive* juga dapat dibangun melalui distribusi kekuasaan, dimana meskipun merupakan paham yang pesimisme, neorealisme mengakui probabilitas adanya kerjasama antarnegara yang akan membuka kesempatan untuk mengaplikasikan kekuatan demi mempertahankan negara. Namun dalam hal ini, neorealisme tetaplah pesimis karena melihat kerjasama merupakan hal yang dinamis dan sulit dikendalikan (Baldwin, 1993). Untuk itu, neorealisme menekankan dalam sebuah kerjasama negara harus hati-hati karena aliansi sewaktu-waktu dapat bergeser menjadi rival bagi negara.

4. Dalam kerjasama internasional, alih-alih mendapat keuntungan mutlak (*absolut gain*), neorealisme lebih berorientasi pada keuntungan yang tidak merata (*relative gain*). Dalam hal ini dijelaskan bahwa tiap-tiap pihak yang terlibat dalam suatu kerjasama internasional akan mendapatkan keuntungan lebih daripada pihak lainnya sehingga keuntungan yang didapatkan akan dirasa tidak sama rata atau relatif, tergantung dari sudut pandang yang berbeda (Baldwin, 1993).

Bagi neorealisme, *power* atau kekuasaan tetaplah penting tetapi bukan merupakan *ultimate goal* bagi negara. Dengan pertimbangan terkait seberapa penting kekuasaan bagi negara, neorealisme kemudian dibagi atas dua yakni neorealisme defensive dan neorealisme offensive (Robert Jackson and Georg Sørensen, 2013). Neorealis defensive yang dikemukakan oleh Steven Waltz memiliki perspektif yang mengabaikan sifat alamiah manusia dan fokus pada dampak yang dihasilkan sistem internasional. Sebagaimana sistem internasional dinilai anarki dan negara dihadapkan dengan sejumlah kekuatan besar, untuk itu negara lemah perlu berupaya dan memilih strategi untuk dapat menghadapinya dan turut menjadi negara kuat (Walt, 1987). Karena sistem berjalan secara anarkis dan tidak adanya otoritas sentral yang dapat mengatur ataupun mengendalikan keanarkisan di dalam sistem, maka tiap-tiap negara perlu menjadi kuat (Waltz, 1979). Dalam kata lain, demi menjaga keamanan dan menghindari konflik dalam sistem internasional yang anarki, tiap negara harus memiliki kekuatan yang seimbang sehingga tidak ada yang terancam.

Sementara neorealis offensive yang dikemukakan oleh John J. Mearsheimer menjelaskan bahwa struktur sistemlah yang menentukan bagaimana negara berperilaku dan bagaimana cara negara memandang satu sama lain. Hal ini yang disebut dengan anarki internasional (Mearsheimer, 2001). Untuk itu, alih-alih hanya berupaya menjadi kuat sama dengan negara lain, neorealisme offensive beranggapan bahwa negara harus berupa meningkatkan kekuatannya dan menjadi yang terkuat, karena keseimbangan kekuatan tidak cukup untuk menjamin keamanan. Sebagaimana sistem internasional anarki, menjadi negara paling kuat adalah jaminan utama bagi negara dapat menghindari ancaman negara lain dan kehilangan eksistensinya di kanca internasional. (Mearsheimer, 2001). Dalam kata lain, sistem yang sedemikian mendorong negara untuk bergerak semakin anarkis, menjadikan negara menjadi negara terkuat adalah solusi untuk dapat *survive*.

Neorealisme kembali menekankan bahwa *power* atau kekuasaan itu adalah alat dan bukan tujuan (Rosyidin, 2020). Untuk menjamin keamanan dan dapat *survive* dalam sistem internasional yang anarki, neorealisme mengemukakan bahwa terdapat dua strategi yang dapat dipilih negara yakni *balancing* atau *bandwagoning*. *Balancing* adalah strategi yang dipilih negara untuk menjamin keamanan yakni dengan cara saling mengikat dengan negara lain (Walt, 1987). Adapun strategi saling mengikat dan beraliansi dilakukan bersama negara yang memiliki tujuan yang sama yakni untuk dapat menghadapi negara lain yang dalam hal ini dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara yang saling mengikat atau negara yang memiliki kekuatan lebih besar dibanding negara lain sehingga negara-negara lain perlu bersatu untuk menghadapi negara yang dianggap kuat sebagai ancaman

keamanan mereka. Terdapat dua alasan negara yang mendasari perilaku negara memilih untuk *balancing*, yaitu *balancing* bertujuan untuk mempertahankan diri atau *survival*. Kemudian alasan lainnya untuk dapat menekan dominasi negara adidaya sehingga tidak menjadi terlalu kuat (Waltz, 1979).

Sedangkan *bandwagoning* digambarkan sebagai strategi yang ditetapkan negara apabila dalam sistem internasional yang anarki, negara dihadapkan dengan berbagai ancaman yang datang dari kekuatan diluar negaranya. Dalam kondisi ini, alih-alih mengikat dengan negara dengan kekuatan dan kapabilitas sama, negara akan lebih memilih untuk untuk bekerjasama dengan satu negara yang dianggap sebagai *source of danger*, yaitu satu negara yang dianggap sebagai sebuah ancaman karena mempunyai kekuatan yang besar melebihi kekuatan negara-negara yang bekerjasama dengannya (Waltz, 1979). Dekat dengan sumber ancaman atau kekuatan paling besar tentu membawa dampak bagi negara yang menerapkan strategi *bandwagon*. Untuk itu, terdapat dua motivasi negara melakukan *bandwagoning* yaitu, pertama *bandwagoning* dilakukan sebagai upaya untuk dapat tentram, sebagaimana beraliansi dengan negara yang paling mengancam serta merta akan membuat negara pelaku *bandwagoning* dapat menghindari ancaman. Kedua, *bandwagoning* dilakukan sebagai upaya negara untuk dapat meraup keuntungan sebagaimana beraliansi dengan pihak paling kuat dan dominan meampukan aliansinya turut mendapatkan cipratan keuntungan, baik secara ekonomi ataupun citra di kanca internasional (Schweller, 1994).

1.6 Operasional Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Neorealisme

Neorealisme memiliki asumsi utama yang menekankan bahwa dalam sistem internasional yang anarki, negara akan melakukan strategi untuk *survive*. Upaya dan *survive* dapat diwujudkan lewat berbagai cara, diantaranya membangun ataupun merubah aliansi dan kerjasama. Memilih aliansi paling potensial menjadi salah satu strategi negara. Aliansi paling potensial dapat sewaktu-waktu berubah sebagaimana isu strategis dan fokus utama suatu negara juga berubah, dengan itu bentuk kerjasama dan hubungan dengan aliansi dibangun sesuai isu strategis yang tengah dihadapi suatu negara. Dalam kajian ilmu hubungan internasional terdapat fenomena manuver politik yang acapkali dilakukan negara sebagai salah satu strategi yang dipilih. Manuver politik adalah adanya perubahan, pergeseran arah kebijakan yang ditetapkan suatu negara secara signifikan. Neorealisme kemudian mengelompokkan strategi yang dipilih negara kedalam dua, yakni berupa *balancing* dan *bandwagoning*.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 *Balancing*

Balancing adalah strategi yang dipilih negara negara untuk saling mengikat dan beraliansi dengan negara lain untuk menghadapi negara yang dianggap kuat

atau pun yang menjadi dianggap sebagai ancaman. Adapun alasan negara memilih untuk *balancing*, yaitu untuk dapat bersatu menghadapi ancaman besar dan mempertahankan diri atau upaya *survival*. Selain itu, *balancing* diterapkan negara-negara yang saling mengikat sebagai upaya untuk dapat menekan dominasi *power* agar tidak menjadi terlalu kuat.

1.6.2.2 *Bandwagoning*

Bandwagoning adalah strategi yang dipilih saat dihadapkan dengan berbagai ancaman dari kekuatan besar diluar negara, sehingga alih-alih beraliansi dengan negara lain demi melawan ancaman dan kekuatan besar, negara yang *bandwagon* akan sepakat untuk bekerjasama negara yang dianggap sebagai *source of danger* atau sumber ancaman itu sendiri karena mempunyai kekuatan yang besar melebihi kekuatan negara-negara yang bekerjasama dengannya. *Bandwagoning* dapat dinilai sebagai strategi mengekor dalam sistem internasional, dimana strategi ini bermaksud untuk mendapatkan ketrentaman dan lepas dari ancaman yang ada, selain itu *bandwagon* ditujukan untuk dapat mendapatkan keuntungan melalui kedekatan dengan sumber ancaman sehingga tetap dapat eksis dan *survive*. Dalam penelitian ini, *bandwagoning* merupakan strategi yang dipilih oleh negara untuk dapat survive dalam sistem internasional yang anarki. Sebagaimana Korea Selatan menjadi negara yang *bandwagon* terhadap Tiongkok dan Tiongkok menjadi negara sumber ancaman terbesar. Alih-alih beraliansi dengan negara lain untuk dapat bertahan di tengah ancaman Tiongkok, Korea Selatan memilih untuk dekat dan

‘mengekor’ dengan Tiongkok, sehingga dapat menghindari ancaman dan meraup keuntungan.

1.6.2.3 Kapabilitas dan Citra Nasional

Membangun kapabilitas negara menjadi salah satu upaya survive yang ditawarkan neorealisme dalam asumsi dasarnya. Kapabilitas dalam negara merujuk pada kemampuan ataupun kekuatan yang dimiliki negara dan dikembangkan negara yang merupakan berasal dari suatu sektor dalam negara untuk dipertunjukkan di kanca internasional. Kapabilitas ditingkatkan oleh negara tidak lain adalah untuk membentuk *image* ataupun citra negara sebagai negara yang maju dan negara yang terkemuka. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana industri kebudayaan Korea Selatan atau yang dikenal sebagai *hallyu* menjadi kapabilitas utama yang dikerahkan dan dikembangkan negara demi menimbun kekuatan dan membangun citra nasional sebagai negara yang masyur dan terkemuka lewat persebaran prosuk-prosuk kebudayaan secara mendunia. Korea Selatan berupaya menempatkan *hallyu* sebagai sumber devisa utama negara, tidak hanya itu *hallyu* telah menjadi potensi utama negara yang dikembangkan hingga menjadi representasi Korea Selatan secara global.

1.7 Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah penyebab Korea Selatan melakukan manuver politik dengan memilih mengikuti kebijakan Tiongkok dan melepaskan kerja sama dengan mitra militernya, Amerika Serikat yaitu karena adanya upaya

untuk *survive* yang dilakukan negara dalam sistem internasional yang anarki. Korea Selatan memilih 'mengekor' kepada ancaman terbesar, lebih lagi dalam kegemarannya untuk mengembangkan industri kebudayaan. Untuk itu, Korea Selatan perlu dekat dengan Tiongkok sebagai pangsa pasar terbesarnya demi semakin meraup keuntungan dalam segi ekonomi dan semakin menimbun kekuatan yang kini dapat dilihat melalui industri kebudayaan.

1.8 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian dimana data yang didapat, dianalisis dan disimpulkan bukanlah data angka, melainkan data yang sifatnya deskriptif, seperti ucapan, tulisan dan perilaku (Furchan, 1992). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa isu yang diangkat dalam penelitian merupakan suatu fenomena politik sementara metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang paling tepat dalam mendefinisikan, mendeskripsikan, sekaligus menganalisis sebuah fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2009).

1.8.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian dengan metode kualitatif, terdapat dua jenis teknis pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang ditetapkan dalam penelitian

ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder berarti teknik yang digunakan dalam memperoleh data bukanlah secara langsung didapat dari sumber asli data, melainkan menggunakan sumber-sumber alternatif yang merujuk pada studi kepustakaan seperti penelitian terdahulu, literatur, review, buku, jurnal, berita internasional, *annual report*, dan web resmi yang berkaitan dengan tema penelitian dan isu yang diusung dalam penelitian.

1.8.2 Teknik Analisis Data

Sebagaimana penelitian ini merumuskan permasalahan yang mempertanyakan alasan dan untuk menjawab pertanyaan “mengapa”, maka teknik analisis akan mengacu pada penjelasan fenomena yang berdasarkan sebab-akibat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kongruen, dimana dalam metode kongruen itu sendiri peneliti dapat berfokus pada variabel independen dan variabel dependen daripada variabel intervensi (Sprinz, 2002). Dengan kata lain, penelitian ini akan berfokus mencari hubungan sebab-akibat diantara kedua variabel tersebut menggunakan data yang dianalisis menggunakan kerangka berpikir yang dipilih. Metode ini dimulai dengan pengumpulan data secara sekunder, kemudian menyeleksi data yang sesuai dengan kerangka berpikir.

1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi kedalam empat bab dengan sistematika berikut:

BAB I: Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang permasalahan, berbagai penelitian terdahulu, serta perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang pernah ada dalam kata lain, bab ini akan membahas alasan dibalik penelitian ini. Kemudian bab ini akan memuat rumusan masalah yang muncul dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori yang hendak digunakan sebagai kerangka, beserta hipotesis atau dugaan awal penulis. Pada bab ini juga memuat rancangan desain penelitian yang tercantum dalam subbab metodologi penelitian.

BAB II: Bab ini berisikan tiga subbab pembahasan. Pertama, memuat segala bentuk kerja sama dan ketergantungan Korea Selatan terhadap Amrerika Serikat. Kedua memuat segala bentuk kerjasama dan ketergantungan Korea Selatan terhadap Tiongkok sekaligus memuat berbagai sanksi boikot yang dikenakan oleh Tiongkok dan dampaknya terhadap Korea Selatan. Ketiga, memuat penjelasan terkait industri kebudayaan Korea Selatan sebagai kekuatan utama negara.

BAB III: Bab ini berisikan analisis terhadap fenomena manuver politik yang ditetapkan Korea Selatan. Lebih lagi. Bab ini menganalisis dasar perubahan sikap dan aliansi yang dipilih Korea Selatan sekaligus membahas bagaimana pergeseran isu strategis dapat terjadi. Dalam analisis ini, penulis berupaya menghubungkan teori sebagai landasan pemikiran dan menetapkan korelasi yang ada diantara fenomena, data dan landasan teori.

BAB IV: Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang memuat bagian penutup dari penelitian. Terdapat kesimpulan terkait penelitian dan hasil penelitian secara menyeluruh, kemudian saran penelitian yang berisikan saran untuk masalah yang muncul dalam penelitian ini, sekaligus saran untuk penelitian-penelitian terbaru yang sesuai untuk topik penelitian yang ada.